



**PEMBERDAYAAN KELOMPOK WANITA TANI (KWT) ASRI  
DI DUKUH DAWUNG KELURAHAN KEDUNGPANE  
KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana  
Pendidikan Program Pendidikan Luar Sekolah**

**Oleh  
Siti Nur Afifah  
1201415053**

**JURUSAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**2019**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani (KWT) Asri di Dukuh Dawung Kelurahan Kedungpane Kecamatan Mijen Kota Semarang" telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan dalam sidang skripsi.

Hari : Kamis

Tanggal : 7 November 2019

Menyetujui,  
Dosen Pembimbing



Drs. Ilyas, M. Ag  
NIP. 19660601 198803 1 003

Mengetahui,  
Ketua Jurusan PNF



Dr. Mintarsih Arbarini, M. Pd.  
NIP. 196801211993032002

## PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani (KWT) Asri di Dukuh Dawung Kelurahan Kedungpane Kecamatan Mijen Kota Semarang” disusun oleh:

Nama : Siti Nur Afifah  
NIM : 1201415053  
Program Studi : Pendidikan Luar Sekolah

Telah dipertahankan di hadapan panitia penguji skripsi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang pada hari Kamis, 21 November 2019.

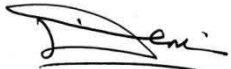
Semarang, 2019

### Panitia Ujian



Dr. J. Satrikoro, Edy Mulyono, M. Si  
NIP. 19680704 200501 1 001

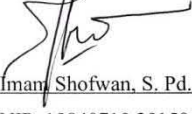
Penguji I

  
Dra. Liliek Desmawati, M. Pd  
NIP. 19591201 198403 2 002


Sekretaris

  
Dr. Mintarsih Arbarini, M. Pd.  
NIP. 196801211993032002

Penguji II

  
Iman Shofwan, S. Pd., M. Pd  
NIP. 19840710 201504 1 003

Penguji III/ Pembimbing

  
Drs. Ilyas, M. Ag  
NIP. 19660601 198803 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa yang tertulis didalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat di dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk dengan kode etik ilmiah. Atas pernyataan ini saya siap menanggung risiko/ sanksi yang dijatuhkan apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya ini.

Semarang, 21 November 2019



embuat pernyataan,

Siti Nur Afifah  
NIM 1201415053

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

Kebahagiaan perempuan yaitu ketika memperoleh pendidikan dan pelajaran dengan sebaik-baiknya. (R.A. Kartini).

Wanita yang baik adalah wanita yang dapat memposisikan dirinya dalam berbagai situasi, bermanfaat untuk sesama serta tidak hanya berkalang pada laki-laki (penulis).

### PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua tercinta bapak Nur Wajib dan Ibu Siti Romlah yang senantiasa memberikan doa dan dukungan baik secara moral maupun materi dalam penyusunan skripsi ini.
2. Kedua adikku tercinta Moh. Khoirul Anwar dan Moh. Taufiq yang selalu memberikan doa dan dukungannya.
3. Ibu Siti Alqomah yang telah memberikan dukungan baik moral maupun materi kepada penulis.
4. Sahabatku Widayanti, Retno, Anisa, Nani, dan Youlinda yang senantiasa memberikan arahan dan dukungan dalam menempuh pendidikan.
5. Segenap teman-teman UKM Bakti Sosial Unnes dan Organisasi Daerah Mahasiswa Tuban yang penulis sayangi.
6. Beberapa pihak yang membantu dan mendukung penulis dalam melaksanakan dan menyelesaikan pendidikan strata satu.
7. Almamaterku Universitas Negeri Semarang.

## KATA PENGANTAR

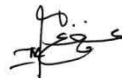
Puji syukur saya haturkan kehadirat Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah memberikn Rahmat serta HidayahNya, sehingga penulis diberikan kesehatan dan dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani (KWT) Asri di Dukuh Dawung Kelurahan Kedungpane Kecamatan Mijen Kota Semarang. Penulis menyadari bahwa terdapat banyak pihak yang mendukung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Dan penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan serta dukungann dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Ahmad Rifa'I RC, M. Pd. Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Mintarsih Arbarini, M. Pd Ketua Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Semarang.
3. Drs. Ilyas. M. Ag dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan dukungan, bimbingan, serta arahan dalam penyusunan skripsi.
4. Segenap Perangkat Desa Dukuh Dawung yang memberikan ijin kepada peneliti untuk melakukan penelitian di Dukuh Dawung.
5. Ibu Juli Ambarwati selaku ketua Kelompok Wanita Tani (KWT) Asri Dukuh Dawung dan bapak Karsidin selaku Ketua Kelompok Tani yang telah berkenan membantu penulis dalam pengumpulan data penelitian.

6. Bapak Sungkono, Bapak Tuslem, dan Ibu Nurhidayati yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian penulis.
7. Segenap anggota KWT Asri Dukuh Dawung yang telah memberikan bantuan, dukungan dan informasi terhadap penulis dalam pengumpulan data di lapangan.
8. Bapak dan ibu dosen Jurusan Pendidikan Luar Sekolah yang telah memberikan ilmunya sehingga penulis dapat menyusun skripsi.
9. Semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis.

Penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyusunan skripsi, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk semua pihak serta peneliti berharap adanya kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca.

Semarang, 2 November 2019



Siti Nur Afifah  
NIM. 1201415053

## ABSTRAK

Afifah, Siti Nur. 2019. “Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani (KWT) Asri di Dukuh Dawung Kelurahan Kedungpane Kecamatan Mijen Kota Semarang”. Skripsi. Jurusan Pendidikan Non Formal Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Drs. Ilyas, M. Ag.

### **Kata Kunci: Pemberdayaan, Kelompok Wanita Tani.**

Rendahnya sumber daya perempuan Dukuh Dawung dalam mengelola potensi sumber daya pertanian mendorong berdiri dan berkembangnya kelompok pemberdayaan petani sehingga dapat membantu meningkatkan perekonomian dan keterampilan untuk masyarakat khususnya petani-petani perempuan Dukuh Dawung. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah (1) Bagaimana proses pemberdayaan Kelompok Wanita Tani (KWT) Asri di Dukuh Dawung, dan (2) Bagaimana dampak dari pemberdayaan Kelompok Wanita Tani (KWT) Asri di Dukuh Dawung. Penelitian ini bertujuan untuk (1) Untuk mendeskripsikan proses Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani Asri di Dukuh Dawung. (2) Untuk mendeskripsikan dampak dari Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani Asri di Dukuh Dawung.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan deskriptif kualitatif. Waktu dan lokasi penelitian ini adalah kurang lebih tiga bulan dan bertempat di Dukuh Dawung Kelurahan Kedungpane Kecamatan Mijen Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan 2 subjek dan 2 informan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Dan uji validitas dan reliabilitas data pada penelitian ini menggunakan triangulasi sumber.

Hasil penelitian yang diperoleh bahwa pemberdayaan KWT Asri di Dukuh Dawung meliputi (1) pengidentifikasian yang terdiri potensi dukuh, permasalahan dukuh dan kelompok serta peluang-peluang kelompok.; (2) perencanaan, terdiri dari kesadaran, perekrutan anggota dan pendamping, persiapan lapangan; (3) pelaksanaan yang terdiri jenis kegiatan, media, materi, partisipasi, dan motivasi, dan (4) pemantauan dan evaluasi program pada proses dan hasil kegiatan. Dampak yang diperoleh dengan adanya pemberdayaan KWT Asri adalah dapat meningkatkan kemandirian, *skill* atau keterampilan, serta keharmonisan antar anggota KWT Asri.

Simpulan dari kegiatan penelitian yang telah dilaksanakan adalah sudah berjalannya program secara terencana dan sistematis sesuai dengan tahap-tahap pemberdayaan yaitu pengidentifikasian, perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi program meskipun belum mencapai kemaksimalan pada pelaksanaan program. Dampak yang dihasilkan dalam program pemberdayaan tersebut mempengaruhi peningkatan perekonomian KWT Asri. Saran yang dapat diberikan peneliti yaitu pelaksanaan program perlu ditingkatkan sesuai dengan rencana program yang telah di sepakati sebelumnya.



## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR BAGAN .....	xi
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	15
1.3 Tujuan .....	15
1.4 Manfaat Penelitian .....	15
1.5 Penegasan Istilah .....	16
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA .....	18
2.1 Pemberdayaan .....	18
2.2 Kelompok Wanita Tani .....	34
2.3 Kerangka Berpikir .....	43
BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN .....	45

3.1 Pendekatan Penelitian .....	45
3.2 Fokus Penelitian .....	47
3.3 Waktu dan Lokasi Penelitian .....	48
3.4 Subjek Penelitian .....	48
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	49
3.6 Analisis Data .....	51
3.7 Keabsahan Data .....	53
<b>BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>55</b>
4.1 Hasil Penelitian .....	55
4.2 Pembahasan .....	87
<b>BAB 5 PENUTUP .....</b>	<b>114</b>
5.1 Simpulan .....	114
5.2 Saran .....	115
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>117</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>124</b>

## **DAFTAR BAGAN**

Bagan 1. Struktur Organisasi KWT Asri .....	64
Bagan 2. Kerangka Berpikir .....	44

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Tabel Gambaran Subjek Penelitian .....	65
Tabel 2. Tabel Sarana dan Prasarana KWT Asri .....	66

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kisi-kisi Pedoman Wawancara untuk Ketua KWT .....	125
Lampiran 2. Kisi-kisi Pedoman Wawancara untuk Anggota KWT .....	127
Lampiran 3. Kisi-kisi Pedoman Wawancara untuk Perangkat Desa .....	129
Lampiran 4. Kisi-kisi Pedoman Wawancara untuk Masyarakat .....	131
Lampiran 5. Pedoman Observasi .....	133
Lampiran 6. Hasil Observasi .....	134
Lampiran 7. Pedoman Wawancara Ketua KWT Asri .....	136
Lampiran 8. Pedoman Wawancara Anggota KWT Asri .....	141
Lampiran 9. Pedoman Wawancara Perangkat Desa .....	146
Lampiran 10. Pedoman Wawancara Masyarakat .....	149
Lampiran 11. Hasil Wawancara Ketua KWT .....	152
Lampiran 12. Hasil Wawancara Anggota KWT .....	169
Lampiran 13. Hasil Wawancara Perangkat Desa .....	183
Lampiran 14. Hasil Wawancara Masyarakat .....	192
Lampiran 15. Dokumentasi Hasil Penelitian .....	199
Lampiran 16. Surat Ijin Penelitian .....	209
Lampiran 17. Surat Balasan Penelitian .....	210
Lampiran 18. Catatan Lapangan .....	211

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Peningkatan perekonomian merupakan usaha dan cita-cita semua bangsa khususnya Indonesia sampai saat ini. Peningkatan yang dilakukan dengan menangani permasalahan perekonomian yang terdapat di Indonesia yang berujung pada permasalahan pembangunan Negara. Sejumlah permasalahan perekonomian Indonesia merupakan permasalahan yang bersifat kompleks dan memerlukan penanganan khusus yang tepat. Sejumlah permasalahan yang dimaksud mencakup kemiskinan, pendapatan rendah, pengangguran serta pembangunan ekonomi yang berjalan lambat dan penanganannya dapat dikelola melalui berbagai sector.

Vinod Thomas (dalam Khotimah, 2018: 39) menambahkan bahwa suatu pembangunan memiliki keterkaitan dengan adanya perbaikan kualitas hidup rakyat, memperluas kemampuan mereka untuk membentuk masa depan mereka sendiri menjadi lebih baik. Pelaksanaan pembangunan tentunya terdapat hambatan atau faktor-faktor yang dapat mempengaruhi laju kembang suatu pembangunan perekonomian Indonesia. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), investasi (penanaman modal), kemajuan IPTEK, organisasi, kemajuan sosial budaya, dan keadaan politik. Namun, hambatan terpokok dalam pembangunan perekonomian terdapat pada sumber daya manusia (SDM) itu sendiri. Hal tersebut dikarenakan pada hakikatnya pada manusia

merupakan “*the man behind the gun*” yang dapat menentukan berhasil atau tidaknya suatu pembangunan dapat yang telah direncanakan sebelumnya.

Dewasa ini kondisi perekonomian Indonesia memang dapat dikatakan lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi perekonomian Indonesia 2-3 tahun yang lalu. Peningkatan-peningkatan tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek seperti dari aspek menurunnya angka pengangguran yang terjadi dari tahun 2015-2018. Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018 menjelaskan bahwa terjadi penurunan angka pengangguran setengah terbuka berdasarkan perbedaan jenis kelamin. Meskipun telah terjadi penurunan pada angka pengangguran, tidak menjadi dasar dan patokan bahwa kondisi Indonesia sekarang berada di zona yang baik dan nyaman dari aspek perekonomian masyarakatnya. Program pembangunan yang menjadi program unggulan pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat dan mengeluarkan masyarakat dari kemiskinan realitanya belum dapat terealisasi dengan cukup baik. Kemiskinan, pengangguran, rendahnya akses lapangan kerja, dan minimnya wawasan yang berbuntut pada jauhnya kesejahteraan masyarakat banyak dijumpai dimana-mana.

Dilansir dari [Republika.co.id](http://Republika.co.id) pada tanggal 27 Agustus 2018, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa untuk saat ini Indonesia mengalami ketidakpastian ekonomi. Saat ini Indonesia menghadapi sejumlah permasalahan. Pertama, tidak adanya perbaikan sejak lama mengenai defisit transaksi berjalan khususnya di neraca perdagangan yang salah satunya dapat memberi pengaruh pada ekspor-impor Indonesia. Kedua, permasalahan primer atau permasalahan yang bersumber dari kondisi SDM Indonesia itu sendiri. Perbaikan-perbaikan kualitas

perekonomian dalam negeri sampai saat ini masih terus ditingkatkan. Salah satunya yaitu dengan mengerjakan secara detail upaya peningkatan di setiap sektor.

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai terobosan untuk mengatasi permasalahan perekonomian masyarakat. Anggaran dana yang digelontorkan untuk peningkatan ekonomi ini merupakan program-program terobosan yang diberikan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat. Salah satunya yaitu dengan adanya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri atau yang dinamakan dengan PNPM Mandiri. Tujuan dari PNPM Mandiri adalah sebagai kail atau langkah awal dengan memberikan peluang kepada masyarakat miskin berdasarkan potensi yang telah dimiliki. Masyarakat diberikan kesempatan untuk menentukan, mengusulkan dan melaksanakan sendiri proyek-proyek yang dipandang penting dan krusial bagi upaya pengentasan kemiskinan di wilayah mereka, dimana komponen terpenting dalam program ini adalah adanya dana bergulir untuk kegiatan usaha.

Secara normatif kedudukan perempuan dan laki-laki adalah sejajar. Perempuan mendapat perlakuan dan kesempatan yang sama dengan laki-laki. Sejatinnya perempuan tidak hanya berkeutatan menjalankan peranan dan tugasnya, sebagai ibu rumah tangga yang mengurus anak-anak dan keluarganya. Namun dengan potensi-potensi dasar, kekuatan, dan keuletan yang terdapat dalam diri perempuan dapat menjadi modal awal perempuan dalam menjalankan perannya untuk menjadi lebih produktif dan mandiri yaitu dengan terus mengembangkan *skill* dan pengetahuannya sesuai dengan kondisi dan kemampuan yang dimilikinya. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Elizabeth (dalam Bhastoni, 2015: 121) yang



menyatakan bahwa di jaman yang sekarang ini, perempuan tidak hanya berperan sebagai teman hidup dan mengurus rumah tangga saja, melainkan turut serta memberikan peran dalam menciptakan ketahanan ekonomi rumah tangga.

Perkembangan zaman yang millennial perempuan dituntut untuk siap menghadapi perkembangan dan tuntutan zaman yang semakin keras dan siap bersaing dalam menguasai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), mampu menciptakan atau mengembangkan hal-hal baru serta mampu untuk hidup secara mandiri. Mandiri dalam arti mampu berusaha dan mengupayakan dirinya agar terus berkembang dan terus berinovasi untuk menjadi lebih produktif dan mandiri sehingga dia mampu menyelesaikan permasalahannya dan mampu bertahan hidup. Perempuan memiliki kedudukan sebagai makhluk individu dan sosial dimana perempuan memiliki hak untuk dapat menentukan kehendak menurut pribadinya. Hal ini peran dan kedudukan perempuan terbagi menjadi dua bagian yaitu: (1) memiliki peranan dan kedudukan di dalam rumah tangga sebagai tenaga labor yang berhubungan langsung dengan masalah mengurus rumah tangga; dan (2) peranan dan kedudukannya di luar keluarga yang meliputi usaha untuk mencari nafkah untuk memperoleh penghasilan keluarga serta jangkauan sosial terhadap berbagai kegiatan di luar rumah tangga (Aswiyati: 2016: 6). Perempuan memiliki kedudukan dan tugas sebagai jantung rumah tangga yang dapat mengatur serta mengelola persoalan-persoalan yang terjadi. Sehingga tidak jarang dijumpai dengan perempuan-perempuan yang memiliki peran ganda dalam kehidupannya. Peran-peran tersebut biasanya dijalankan selain untuk memenuhi

tugasnya sebagai ibu rumah tangga, juga untuk mengasah kemampuannya dalam meningkatkan strata sosial dalam masyarakat.

Namun realitanya yang terjadi pada keterlibatan perempuan dalam pembangunan, status dan peran perempuan masih termarginalkan. Peran perempuan dalam memperoleh akses sumber-sumber ekonomi dan ruang publik masih terbatas dan tidak lebih banyak dari yang diperoleh laki-laki. Perempuan menjadi pihak yang rentan dan kurang mendapat kesempatan di ruang public dimana kondisi ini dapat dilihat dalam sector industry. Perusahaan-perusahaan lebih memilih untuk memiliki aset karyawan laki-laki dibandingkan dengan perempuan dengan alasan lebih efisien dan praktis (Kusumaningrum, 2016: 28). Kepercayaan yang diberikan terhadap kaum perempuan dalam menyelesaikan sesuatu masih sering diragukan, sehingga yang terjadi adalah rasa ketidakpercayaan yang terdapat pada diri perempuan dalam mengembangkan potensi yang dimiliki semakin besar.

Jumlah perempuan di Indonesia lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah laki-laki. Berdasarkan proyeksi pertumbuhan penduduk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, BPS tahun 2018 dan *Unite Nations Population Fund* tahun 2018 data penduduk perempuan Indonesia mencapai 131,9 juta jiwa dengan usia produktif perempuan usia 20-64 tahun mencapai 86,57 juta jiwa. Jumlah perempuan yang besar harapannya mampu memberikan sumbang asih yang sama besar dalam sekt or pembangunan negara. Mampu menciptakan perempuan mandiri yang lebih baik, bijak, serta sigap dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi sesuai dengan kebutuhan dan aturan yang berlaku.

Namun fakta yang terjadi adalah tabiat perempuan yang konsumtif masih melekat erat pada diri perempuan. Keinginan akan pemenuhan kebutuhan pribadi mereka lebih besar jika dibandingkan dengan laki-laki. Misalnya dalam kebutuhan berbelanja, tingkat kepuasan mereka jauh lebih tinggi daripada laki-laki. Selain konsumtif, sifat kurang produktif dalam memanfaatkan sisa-sisa waktu yang dimiliki kerap kali ditemukan pada perempuan-perempuan masa kini. Beberapa faktor yang melatarbelakanginya diantaranya adalah faktor eksternal seperti faktor ekonomi atau modal dan faktor internal seperti kemauan dan kemampuan individu tersebut.

Menyikapi berbagai realita perempuan yang ada, harapannya adalah adanya kesadaran, kemampuan dan kemauan perempuan untuk turut ikut serta dalam usaha pembangunan maka akan menciptakan perempuan yang sadar akan pencapaian karir, peningkatan jenjang pendidikan, kemandirian finansial, melekat teknologi, hingga kesadaran akan rasa aman dan nyaman bagi diri sendiri tanpa menghilangkan peran dan fungsi laki-laki (Dewi, 2017: 208). Perubahan pola pikir serta usaha pembelajaran perempuan yang diharapkan tersebut merupakan suatu usaha yang terus digalakkan sampai saat ini mulai dari perkotaan hingga pedesaan sebagai bentuk dari usaha pembangunan berbasis pemberdayaan.

Pemberdayaan menurut Theresia, dkk (2015: 94) merupakan suatu upaya untuk membangun daya itu sendiri dengan memberikan dorongan, motivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkan dan memperkuat potensi tersebut. Program pemberdayaan ini merupakan salah satu bentuk upaya untuk memperbaiki status dan peran seseorang

dalam keterlibatan pembangunan bangsa serta peningkatan kualitas dari peran seseorang tersebut. Pemberdayaan ini dapat dilakukan dengan pemberian pembinaan dan pendampingan untuk perempuan atau ibu-ibu rumah tangga khususnya dengan kelas perekonomian menengah ke bawah dengan tujuan agar melalui usaha pemberdayaan tersebut dapat membantu mereka dalam meningkatkan perekonomian keluarga serta menciptakan perempuan-perempuan tangguh dan mandiri.

Secara tidak langsung pernyataan tersebut menjelaskan bahwa pemberdayaan perempuan merupakan salah satu bentuk upaya meningkatkan peran perempuan untuk memperoleh persiapan, pembinaan dan perlindungan agar perempuan mempunyai hak yang sama untuk memiliki rasa kepercayaan diri dan mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan suatu permasalahan.

Selain pandangan bahwa perempuan sebagai individu yang tidak berdaya, bentuk *subordinatif* (penomorduaan) dapat menghambat perempuan dalam sektor pembangunan. Hal ini dapat dilihat pada perkembangan budaya *paternalism* dalam birokrasi di Indonesia dimana perempuan tidak banyak memainkan perannya. Posisi mereka tersubordinasi dan termarginalisasi dalam berbagai bidang (Partini, 2004: 322). Perempuan tidak memiliki peluang yang cukup untuk mengambil keputusan bahkan menyangkut dirinya, perempuan harus tunduk pada keputusan yang diambil oleh laki-laki seperti penempatan perempuan di rumah, keputusan keluarga yang memberikan kesempatan pada laki-laki untuk meraih pendidikan, ketarampilan maupun karier, dianggap lemah untuk memimpin suatu kelompok, dan tidak memiliki hak dalam mengelola ekonomi keluarga sehingga menghambat

keikutsertaannya dalam mengembangkan dan melaksanakan program pembangunan.

Paradigma pemberdayaan perempuan pada dasarnya menuntut pada pendekatan yang tidak memposisikan perempuan sebagai obyek melainkan sebagai subyek dalam kegiatan pembangunan. Melalui pendekatan tersebut diharapkan akan melahirkan model-model pembangunan yang lebih partisipatif sehingga kontribusi perempuan tidak hanya ditandai dalam bentuk uang, tenaga, dan *in-natura*, melainkan harus menghadirkan unsur inisiatif dan determinasi yang benar-benar tumbuh dari perempuan (Ahmad Yani, 2017: 4).

Indonesia merupakan Negara agraris yang memiliki tanah dengan tingkat kesuburan yang tinggi. Tanah di Indonesia yang *Gemah Ripah Lohdjinawe Dan Ijo Royo-Royo* merupakan salah satu sumber mata pencaharian terbesar masyarakat Indonesia. Sebagai Negara penghasil swasembada beras pada tahun 1984 karena mampu menjadi pengimpor beras terbesar di dunia pada tahun 1974 yang mencapai lebih dari satu juta ton melalui program revolusi hijau menunjukkan bahwa Indonesia memiliki lahan pertanian yang cukup luas dengan hasil yang menjanjikan. Sehingga dengan potensi besar tersebut menjadikan sektor pertanian memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam perekonomian nasional.

Sektor pertanian mampu memberikan sebagian besar penduduk yang terdapat di pedesaan untuk menyediakan bahan pangan bagi penduduk. Selain itu sektor pertanian mampu menyediakan bahan mentah untuk industri dan menghasilkan devisa Negara melalui ekspor non migas. Bahkan yang perlu diketahui adalah bahwa sektor pertanian mampu menjadi katup pengaman

perekonomian nasional dalam menghadapi krisis ekonomi yang melanda Indonesia dalam satu dasawarsa ini (Sadono, 2008: 65). Kondisi tanah yang gembur dan cocok sebagai media tanam berbagai jenis makanan pokok, buah, dan sayuran, serta didukung dengan iklim Indonesia yang tropis seharusnya dapat meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat Indonesia.

Namun realita yang terjadi adalah lahan-lahan pertanian yang terdapat di Indonesia saat ini tengah menghadapi persoalan, dimana tingkat kesuburan tanah mulai berkurang. Berkurangnya kesuburan tanah diduga kuat bersumber dari penggunaan pupuk kimia dan sistem olah tanam intensif yang telah dilakukan selama puluhan tahun tanpa dibarengi dengan penambahan material organik. Penyuplaian pupuk kimia yang berlangsung secara terus menerus tanpa adanya materi organik secara regular dapat menjadikan tanah pertanian menjadi miskin hara, miskin keanekaragaman mikroba, menjadikan tekstur tanah menjadi keras dan tidak gembur (Sri Wahyono, 2010: 29). Menurunnya kesuburan lahan merupakan salah satu sebab dari menurunnya produktivitas pertanian. Apabila kondisi tersebut terus dibiarkan, maka ketahanan pangan Indonesia akan terancam.

Tahun 2018 data Badan Pusat Statistik mencatat jumlah lahan baku sawah yang ada semakin menurun hingga 7,1 hektar jauh mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 7,75 hektar. Dikhawatirkan pengikisan lahan pertanian tersebut akan terus mengalami peningkatan pada tahun-tahun berikutnya dan menghilangkan salah satu kekayaan bangsa Indonesia ini. Selain faktor dari pengalihan fungsi lahan menjadi pusat industri, penurunan lahan pertanian juga dipengaruhi oleh faktor sumber daya manusia atau potensi yang

dimiliki oleh petani Indonesia sendiri. Minimnya pengetahuan dan pemahaman petani Indonesia dalam memahami tekstur tanah serta proses pengolahan tanaman yang mereka tanam agar memiliki nilai jual yang tinggi, membuat mereka kerap menjual hasil panen yang didapatkan secara langsung. Melalui pengolahan hasil pertanian maka akan menjadi nilai tambah produk pertanian sehingga memiliki nilai jual yang meningkat dan produk tersebut dapat bersaing di pasaran dan memberikan keuntungan (Siswati, 2017: 44). Tidak jarang pula petani Indonesia sering mengalami kerugian akibat gagal panen ataupun karena pengeluaran selama proses penanaman dan perawatan tidak sebanding dengan harga jual pasar yang terjadi.

Program pertanian Indonesia menjadi lebih baik, inovatif, serta siap bersaing dengan negara-negara berkembang lainnya dalam mewujudkan negara yang mandiri dengan bantuan berbagai pihak. Salah satunya yaitu dengan adanya keterlibatan perempuan dalam pengelolaan dunia pertanian. Perempuan memiliki andil yang cukup berpengaruh dalam pengelolaan pertanian. Adanya petani-petani perempuan yang tergabung dalam Kelompok Wanita Tani (KWT), hasil pertanian menjadi lebih memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Melalui proses pemberdayaan KWT, selain meringankan dan membantu pekerjaan dari suami atau Kelompok Bapak Tani, KWT dapat membantu petani perempuan menjadi lebih produktif dan mandiri. Kaum perempuan akan belajar manajemen sampai mengolah hasil pertanian dengan berbagai pengembangan sesuai dengan kebutuhan pasar dan potensi yang dimilikinya. Dengan demikian adanya KWT sangat

membantu memberdayakan perempuan dalam program pembangunan berbasis pemberdayaan.

Kelompok Wanita Tani merupakan kumpulan ibu-ibu istri petani atau wanita yang memiliki aktivitas dibidang pertanian yang tumbuh berdasarkan keakraban, keserasian, serta kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian dan bekerjasama dalam meningkatkan produktivitas usaha tani, potensi anggota tani, dan kesejahteraan anggotanya. KWT biasanya menempati di tingkatan dukuh atau desa yang memiliki potensi alam berupa lahan pertanian baik lahan kering atau lahan basah. Keberadaan KWT dirasa dapat menjadi motor penggerak dan penambahan wawasan atau inovasi ke petani-petani dalam mengolah lahan dan meningkatkan pemerolehan hasil panen baik untuk anggotanya maupun untuk masyarakat setempat.

Selain itu KWT merupakan salah satu wadah perkumpulan yang efektif dan bermanfaat dalam membantu KT untuk mengelola, mengolah, serta memasarkan produk tani yang mereka hasilkan dengan berbagai pengembangan atau inovasi yang mereka dapatkan selama mengikuti pertemuan atau pelatihan di forum KWT. Keberadaan KWT sangat diperlukan mengingat masih banyak dijumpainya petani yang menjual hasil panen secara mentahan dengan harga yang murah, selain itu dikarenakan perlunya menambah wawasan bagi para petani mengenai proses serta jenis-jenis tanaman yang lebih inovatif dan menguntungkan.

Kota Semarang merupakan kota metropolitan yang menjadi tempat tumbuh kembangnya beberapa industri-industri dan perusahaan-perusahaan. Kondisi perkotaan yang padat penduduk dan lahan untuk industri tersebut, tentunya sudah



sulit untuk ditemui lahan pertanian di kota besar ini. Mata pencaharian yang menjadi lumbung kehidupan masyarakat ini sudah mulai terkikis keberadaannya di ibukota Jawa Tengah ini. Lahan pertanian banyak yang digusur dan berubah menjadi berbagai fasilitas umum seperti tempat wisata, pabrik, perusahaan, hotel, pusat perbelanjaan atau yang lainnya. Pergeseran alih fungsi lahan tersebut akan menimbulkan beberapa pengaruh yang akan mengganggu pada kehidupan masyarakat sendiri, diantaranya: (1) dapat mengganggu perekonomian masyarakat petani karena minimnya lahan yang dimiliki; (2) mengganggu ekosistem tanah; serta (3) mengurangi daya tarik akan keberadaan sumber daya alam. Oleh karena itu sejak awal tahun 2017 pemerintah kota Semarang mulai mengusahakan gerakan baru yaitu “*Go Organic*” yang pertama kali dilakukan di Kecamatan Mijen. Tempat tersebut menjadi tempat yang pertama kali dipilih untuk melakukan pembukaan lahan karena lokasi yang dekat dengan BSB City Semarang dan Waduk Jatibarang.

Salah satu dukuh yang terdapat di Kecamatan Mijen yang berlokasi sangat dekat dengan daerah perbatasan tersebut adalah Dukuh Dawung RT: 05 RW: 02 Kelurahan Kedungpane. Dukuh dengan mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani ini memiliki dua lahan persawahan yaitu lahan kering dan lahan basah. Kondisi dukuh yang berada pada kelas perekonomian menengah ke bawah menjadikan mereka banyak menggantungkan nasib dan hidupnya dari hasil pertanian. Kondisi dukuh yang memiliki tanah yang subur menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat setempat. Lahan-lahan di dukuh tersebut oleh KT ditanami padi, jagung, sayur mayur, ubi-ubi an, buah-buahan, serta berbagai macam empon-empon atau rempah-rempah. Pembagian letak penanaman jenis tanaman

tersebut disesuaikan dengan kondisi tanah yang diperlukan. Untuk padi dan jagung biasanya mereka dapat memanen dalam satu tahun dapat memanen 2-3 kali, sedangkan untuk buah, sayur, dan empon-empon mereka lebih sering memanennya terlebih dulu.

Perpaduan kondisi Kota Semarang yang terus mengupayakan *Go Green* dengan kondisi dukuh Dawung yang memiliki potensi bagus untuk dikembangkan tersebut menjadi dasar terbentuknya KT Tirto Jati Makmur yang kemudian di susul oleh KWT Asri yaitu pada tahun 2014. Terbentuknya kelompok-kelompok tersebut membantu masyarakat yang tergabung di dalamnya dalam memecahkan masalah yang mereka hadapi. Bekerja sama dengan berbagai instansi seperti Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kota Semarang, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta beberapa lembaga swasta seperti pemerintah desa terus mereka upayakan dan dikembangkan. Berbagai inovasi-inovasi perbaikan dan pengembangan kualitas petani dukuh Dawung pun masih terus diupayakan melalui beberapa kegiatan yang mereka usung.

Usaha-usaha tersebut diusung untuk membantu kehidupan para petani agar lebih tenang dan perekonomian mereka menjadi lebih terbantu. Pembangunan berbasis pemberdayaan yang merupakan salah satu usaha pemerintah baik pemerintah kota maupun pusat dalam meningkatkan kehidupan petani desa. Oleh karena itu pemberian bantuan awal untuk mereka, pendampingan pelaksanaan, hingga proses evaluasi program terus dilaksanakan. Salah satunya yaitu yang terjadi pada KWT Asri Dukuh Dawung Kelurahan Kedungpane Kecamatan Mijen Kota Semarang.

KWT Asri merupakan satu-satunya KWT yang terdapat di Kelurahan Kedungpane yang memiliki progress dan partisipasi anggota yang cukup bagus. Selain membantu suami untuk mengembangkan pertanian, KWT juga berperan untuk mengolah hasil panen agar memiliki nilai jual yang lebih. Misalnya mengolah singkong menjadi Getuk, membuat Jahe Berbagai kegiatan KWT Asri yaitu (1) pertemuan rutin yang dilaksanakan tiap satu bulan sekali untuk membahas dan mengevaluasi hasil tanam mereka, pemantuan dan pendampingan proses dan hasil perkembangan bantuan yang diberikan, serta informasi-informasi tambahan yang dapat memperkaya hazanah pengetahuan mereka tentang dunia pertanian; (2) pemberian pelatihan, dan (3) kerja bakti setiap satu minggu sekali. Oleh karena itu mereka lebih partisipatif dan aktif dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang terdapat di KWT Asri.

Melalui proses-proses yang mereka ikuti tersebut seiring waktu dapat menciptakan dan membentuk sosok perempuan yang mandiri serta kreatif dalam menghadapi dan mengelola permasalahan yang mereka hadapi, Mereka menjadi lebih siap dan lebih terbuka akan saran-saran yang diberikan yang akhirnya mereka mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani (KWT) Asri di Dukuh Dawung Kelurahan Kedungpane Kecamatan Mijen Kota Semarang.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah:

1.2.1 Bagaimana proses Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani Asri di Dukuh Dawung Kelurahan Kedungpane Kecamatan Mijen Kota Semarang?

1.2.2 Bagaimana dampak dari Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani Asri di Dukuh Dawung Kelurahan Kedungpane Kecamatan Mijen Kota Semarang?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1.3.1 Untuk mendeskripsikan proses Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani Asri di Dukuh Dawung Kelurahan Kedungpane Kecamatan Mijen Kota Semarang.

1.3.2 Untuk mendeskripsikan dampak dari Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani Asri di Dukuh Dawung Kelurahan Kedungpane Kecamatan Mijen Kota Semarang.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak. Manfaat tersebut dapat dilihat dari segi teoritis dan segi praktis:

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan kelompok wanita tani melalui pemberdayaan yang berada di Dukuh Dawung Kelurahan Kedungpane Kecamatan Mijen Kota Semarang.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1.4.1.1 Bagi peneliti

Bagi penulis hasil penelitian menjadi syarat untuk menempuh gelar sarjana pendidikan dan menambah ilmu pengetahuan mengenai program pemberdayaan untuk meningkatkan perekonomian keluarga dan masyarakat melalui Kelompok Wanita Tani (KWT).

#### 1.4.1.2 Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian dapat menjadi pedoman dasar untuk mahasiswa lain yang mengambil tema sama dalam sebuah penelitian.

#### 1.4.1.3 Bagi Masyarakat

Masyarakat dapat mengambil manfaat dari hasil penelitian berupa pengetahuan dan wawasan baru berkenaan dengan proses pemberdayaan melalui suatu kelompok wanita tani (KWT).

### **1.5 Penegasan Istilah**

Penegasan istilah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan salah tafsir agar pembaca dapat memiliki pemikiran yang sejalan dengan penulis. Adapun batasan mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian adalah:

#### **1.5.1 Pemberdayaan**

Pemberdayaan adalah program pengembangan sumber daya manusia (*human resources development*) yang diberikan oleh lembaga pemerintahan atau yang lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, sikap, dan berbagai keterampilan (Nurhalim, 2012: 17).

### **1.5.2 Kelompok Wanita Tani**

Kelompok Wanita Tani atau KWT adalah organisasi atau kelompok masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan *skill* warga belajar untuk mendapatkan pelatihan atau pembinaan dari dinas pertanian dan dinas ketahanan pangan yang harapannya mampu menggerakkan kegiatan-kegiatan yang dapat menunjang perekonomian (Taufiq, 2018: 215).

## **BAB 2**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pemberdayaan**

##### **2.1.1 Pengertian Pemberdayaan**

Pemberdayaan atau pemberkuasaan secara konseptual berasal dari kata *power* yang berarti kekuasaan atau keberdayaan. Menurut Suharto (2014: 59) Pemberdayaan dapat dikategorikan sebagai sebuah proses dan sebuah tujuan. Pemberdayaan dikatakan sebuah proses dikarenakan pemberdayaan merupakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat terutama individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sedangkan pemberdayaan dikatakan sebuah tujuan dikarenakan pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh perubahan sosial; yaitu terbentuknya sebuah masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti memiliki rasa kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, memiliki mata pencaharian, mampu berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Suatu pemberdayaan menurut Suharto (2014: 59) menunjuk pada kemampuan manusia, khususnya pada kelompok yang rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan dan kemampuan dalam: (a) Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*) yang meliputi kebebasan

mengemukakan pendapat, kebebasan dari kelaparan, bebas dari kebodohan, dan bebas dari kesakitan. (b) Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan dapat meningkatkan pendapatan mereka serta mereka dapat memperoleh barang dan jasa yang mereka perlukan, dan (c) Turut berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang memengaruhi mereka.

Makna “kekuatan” yang menunjuk pada proses pemberdayaan menurut menurut S. Batliwala (dalam Rahman, 2013: 11) mengandung makna bahwa pemberdayaan adalah tentang mengubah keseimbangan kekuasaan dalam masyarakat tertentu, kekuasaan didefinisikan sebagai kontrol atas sumber daya dan ideologi. Sumber dayanya mungkin dikategorikan ke dalam fisik, manusia, intelektual, keuangan, dan diri, termasuk harga diri, kepercayaan diri, dan kreativitas. Ideologi mengacu pada kepercayaan, nilai-nilai, sikap, dan cara berpikir dan memahami situasi.

*According to S. Batliwala (1993) in Rahman, Md. Aminur (2013: 11) the word “power” is contained within the term empowerment implying that empowerment is about changing the balance of power in a given society, power being defined as control over resources and ideology. The resource maybe categorized into physical, human, intellectual, financial, and self, including self-esteem, confidence, and creativity. Ideology refers to beliefs, values, attitudes, and ways of thinking and perceiving situations.*

Pemberdayaan merupakan suatu konsep pengembangan individu atau kelompok agar dapat menentukan dan menyelesaikan masalahnya, mendorong mereka dalam mengembangkan potensi dirinya, menyadarkan mereka akan kekuasaan penuh dalam pengembangan kemampuannya, serta menjadikan individu atau kelompok menjadi berdaya yaitu dengan mengembangkan potensi diri dan menyelesaikan permasalahannya secara mandiri untuk mewujudkan pribadi yang



sejahtera (Deraputri, 2017: 293). Adanya program pemberdayaan sangat diperlukan karena saat ini pengembangan sumber daya manusia (*human resources development*) merupakan suatu hal yang mutlak harus dilaksanakan, dimana aset manusia merupakan aset terbesar yang dimiliki oleh lembaga pemerintahan atau lembaga, oleh karena itu aset manusia harus terus mengalami peningkatan ilmu pengetahuan, sikap, dan berbagai keterampilan (Khomsun Nurhalim, 2012: 17).

Pemberdayaan menurut *World Bank* adalah upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat agar mampu dan berani mengeluarkan ide, pendapat, gagasan-gagasannya serta kemampuan dan keberanian dalam memilih dan menentukan suatu konsep, metode, produk yang terbaik bagi pribadi, keluarga, dan masyarakat (Mutia Dewi, 2018: 28). Sedangkan menurut Usman (dalam Mulyono, 2017: 31) pemberdayaan merupakan suatu proses pembelajaran masyarakat untuk mengembangkan seluruh potensi agar dapat berperan serta dalam sebuah pembangunan.

Tujuan pemberdayaan dalam *community development* menurut Suharto (dalam Sugito, 2018: 8) adalah membentuk kemandirian, integrasi dan kemampuan masyarakat melalui perencanaan sosial dalam memecahkan masalah yang disebabkan oleh ketidakadilan, ketidakmerataan dan kesetaraan yang mengakibatkan kurangnya kemampuan dan relasi sehingga dilakukannya aksi sosial untuk perubahan struktur, lembaga dan sumber kekuasaan. Sedangkan Mardikanto (2017: 109) menambahkan tujuan dari pemberdayaan diarahkan pada terwujudnya perbaikan teknis bertani (*better farming*), perbaikan usaha tani (*better business*), dan perbaikan petani dan masyarakatnya (*better living*). Dimana tujuan

dari pemberdayaan tersebut berimplikasi dari strategi pembangunan yang berbasis pada pengembangan masyarakat (*people centered development*).

Unsur utama dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah pemberian kewenangan dan pengembangan kapasitas masyarakat (Soetomo, 2015: 88). Pemberdayaan pada hakikatnya merupakan bagaimana dalam membentuk masyarakat yang mampu membangun serta memperbaiki kehidupannya sendiri. Kategori mampu yang dimaksudkan adalah berdaya, paham, termotivasi, memiliki kesempatan, dapat melihat dan memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mengetahui langkah alternatif yang akan diambil, mampu mengambil keputusan, berani mengambil risiko, mampu mencari dan menangkap informasi serta mampu bertindak secara inisiatif (Anwas, 2014:49).

Kemudian Muljono (2019: 72) suatu pembangunan manusia dapat dikatakan sebagai pemberdayaan apabila didalamnya memiliki dasar-dasar pemberdayaan, yaitu: *community-based development, sustainability, community participation, development of social capital of the community, and elimination of gender imbalances*. Beliau menyebutkan bahwa dasar dari pemberdayaan meliputi: pemberdayaan harus berbasis pengembangan masyarakat; pemberdayaan bersifat keberlanjutan; didalamnya terdapat partisipasi masyarakat; adanya pengembangan modal sosial untuk masyarakat; dan penghapusan ketidaksetaan gender. Oleh karena itu pelaksanaan pemberdayaan dalam kelompok dijadikan wahana untuk mengembangkan kapasitas sosial masyarakat dalam mengembangkan potensi dalam konteks kehidupannya. Selain mengembangkan aspek kognitif, psikomotorik, dan pengembangan afektif, pemberdayaan juga bermanfaat untuk

mengembangkan potensi yang berasal dari aspek sosiologis, budaya, ekonomi, dan alam. Hal tersebut selaras dengan pernyataan Marzuki dalam Ariefianto (2019: 21) bahwa “...*But in developing the potential it is not only pleasing to the psychological aspects but also the sociological, cultural, economic, and natural aspect.*”

Suatu pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya merupakan salah satu strategi pemerintah yang selama ini masih terus digencatkan, yaitu program unggulan pembangunan. Oleh karena itu paling tidak dalam sebuah pembangunan mengandung beberapa prinsip diantaranya: (1) adanya sebuah transparansi (keterbukaan); 2) partisipatif; (3) pembangunan tersebut dapat dinikmati hasilnya oleh masyarakat; (4) pembangunan yang sedang atau telah dilakukan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabilitas), dan (5) pembangunan bersifat berkelanjutan (*sustainable*). Dengan demikian dalam proses pembangunan didasarkan pada kemampuan yang terdapat pada masyarakat sehingga tidak terlalu mengharapkan pemberian dari pihak luar baik pemerintah maupun swasta (Muarrifudin, 2016: 62).

Menurut Adisasmita (dalam Muarifudin, 2016: 62) dalam sebuah pembangunan yang terjadi di pedesaan hambatan utama yang mempengaruhinya adalah terbatasnya ketersediaan prasarana untuk mengembangkan kegiatan produksi dan akses pemasaran serta terbatasnya sarana pelayanan kesehatan dan pendidikan. Ketika hambatan tersebut terjadi dalam salah satu usaha pembangunan yaitu pemberdayaan, maka yang terjadi adalah kemandekan atau tidak dapat berkembangnya kualitas SDM masyarakat melalui pemanfaatan potensi yang telah ada. Nasdian menambahkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menghambat

proses pemberdayaan yaitu dapat dilihat dari dimensi structural-kultural. Dimensi structural yang dimaksud adalah dimensi yang bersumber pada struktur sosial yang berlaku pada sebuah komunitas. Sedangkan dimensi kultural yang dimaksud adalah sikap pasrah dari anggota komunitas atau kelompok karena terjerat dalam berbagai macam kekurangan sehingga anggota komunitas tidak memiliki inisiatif, gairah, dan tidak dinamis untuk mengubah nasib mereka kearah yang lebih baik.

Lebih jauh lagi, dalam penelitian yang dilakukan oleh Mulyono (2015: 57) menyatakan bahwa salah satu kendala dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat adalah kurangnya konsistensi dalam pelaksanaan program pemberdayaan. Namun demikian, kendala tersebut dapat diatasi melalui musyawarah dan diskusi antara tutor/ penyuluh dengan masyarakat atau warga belajar yang bersangkutan. Namun jika kondisi tersebut terus berlangsung maka akan mempengaruhi tujuan awal dari adanya pemberdayaan yang merupakan meningkatkan potensi masyarakat sehingga memperoleh kualitas hidup yang lebih baik.

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dijelaskan di atas, pemberdayaan merupakan suatu strategi pembangunan manusia dengan melakukan pengembangan potensi untuk masyarakat khususnya masyarakat rentan atau masyarakat miskin agar mereka dapat menyelesaikan permasalahan mereka baik dari aspek sosial, ekonomi, pendidikan maupun kesehatan melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia.

### **2.1.2 Tahapan-Tahapan Pemberdayaan**

Tahap-tahap pemberdayaan menurut Sulistiyani (dalam Wibowo, 2017: 95) adalah sebagai berikut: (1) Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri; (2) Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan dan kecakapan keterampilan; dan (3) Tahap peningkatan kemampuan intelektual dan keterampilan yang mengantarkan pada kemandirian.

Sedangkan menurut Mulyono (2017: 87) langkah-langkah strategi pemberdayaan masyarakat untuk mencapai tujuan yang diinginkan adalah sebagai berikut: (1) memetakan karakteristik orang miskin; (2) mencari sasaran pemberdayaan yang disesuaikan dengan kelompok target potensial; (3) pemberdayaan dilakukan melalui proses pendidikan dan pelatihan, disesuaikan dengan kebutuhan pasar baik dunia industri maupun dunia usaha; (4) mempertemukan antara kelompok target potensial dengan kebutuhan pasar; (5) masyarakat menjadi berdaya; dan 6) terjadi peningkatan ekonomi masyarakat dan/atau memiliki mata pencaharian.

### **2.1.3 Strategi Pemberdayaan**

Strategi pemberdayaan merupakan “*to foster an identity to loyalty of local community*” (Hidayat, 2019: 3). Strategi pemberdayaan merupakan suatu cara untuk menumbuhkan identitas untuk loyalitas komunitas sosial. Loyalitas yang dimaksud adalah mobilisasi masyarakat dalam turut serta melakukan proyek pengembangan. Strategi pemberdayaan menurut Suharto (2014: 66) dapat dilakukan secara

individual maupun secara kolektivitas atau tetap mengaitkan dengan individu dengan sumber-sumber atau potensi yang terdapat dari luar dirinya.

Menurutnya strategi pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga aras atau mata pemberdayaan (*empowerment setting*) yaitu: (1) Aras mikro atau pendekatan yang berpusat pada tugas (*task centered approach*), yaitu pemberdayaan dapat dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, stress management, crisis intervention. Dengan tujuan untuk membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. (2) Aras makro atau strategi sistem besar (*large-system strategy*), yaitu pemberdayaan yang memandang klien memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak, dan (3) Aras mezzo, yaitu pemberdayaan yang dilakukan terhadap sekelompok klien dimana menggunakan kelompok sebagai media intervensi.

Strategi pemberdayaan dapat diperoleh melalui proses *Forum Group Discusstion* (FGD) dan berdasarkan wawancara mendalam melalui *keyperson*. Strategi pemberdayaan menurut Desmawati (2015: 85) terbagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut: (1) *Supply lebih kecil dari demand*, Yaitu dengan memberikan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan kepada masyarakat miskin dan pengangguran untuk mendapatkan keterampilan yang dimulai dari dasar dikarenakan masyarakat yang benar-benar belum memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar. (2) *Supply sama dengan demand*, Yaitu dengan memberikan pelatihan kepada masyarakat yang tujuan utamanya adalah untuk menumbuhkembangkan skill kewirausahaan karena masyarakat telah memiliki

keterampilan sesuai dengan kebutuhan pasar namun belum mencapai kemaksimalan. (3) *Supply tidak sama dengan atau lebih tinggi demand*, Yaitu pemberdayaan masyarakat dengan memberikan pelatihan kepada masyarakat (warga belajar) terutama untuk memfasilitasi peningkatan usaha atau memfasilitasi pencarian alternatif pengembangan usaha karena warga belajar telah memiliki keterampilan yang tidak sama atau lebih tinggi dari kebutuhan pasar.

#### **2.1.4 Prinsip Pemberdayaan**

Prinsip-prinsip pemberdayaan menurut Suharto (2014: 68) adalah sebagai berikut: (1) Pemberdayaan adalah proses kolaboratif. Oleh karena itu antara masyarakat dengan pekerja sosial atau instans-instansi pemberdaya harus saling berkerja sama sebagai partner; (2) Dalam proses pemberdayaan, masyarakat ditempatkan pada posisi subjek atau actor yang kompeten dan mampu dalam menjangkau sumber-sumber dan kesempatan-kesempatan; (3) Masyarakat harus memiliki kesadaran bahwa mereka merupakan agen penting yang dapat memengaruhi perubahan; (4) Kompetensi yang diperoleh nantinya dipertajam melalui pengalaman hidup, khususnya pengalaman yang memberikan perasaan mampu pada masyarakat; (5) Dalam pemberdayaan menghasilkan solusi-solusi yang berasal dari situasi khusus. Solusi yang disajikan harus beragam dan dapat menghargai keberagaman di dalamnya. (6) Jaringan-jaringan sosial informal merupakan sumber dukungan yang penting bagi penurunan bagi ketegangan dan meningkatkan kompetensi serta kemampuan mengendalikan seseorang. (7) Dalam proses pemberdayaan masyarakat harus berpartisipasi dalam pemberdayaan mereka sendiri, tujuan, cara dan hasil harus dirumuskan oleh mereka sendiri. (8) Tingkat

kesadaran masyarakat merupakan kunci dalam sebuah pemberdayaan. (9) Suatu pemberdayaan melibatkan akses terhadap sumber-sumber dan kemampuan untuk menggunakan sumber-sumber tersebut secara efektif. (10) Proses pemberdayaan bersifat dinamis, sinergis, berubah terus, evolutif, dan permasalahan selalu memiliki beragam solusi, dan (11) Pemberdayaan dicapai melalui struktur-struktur personal dan pembangunan ekonomi secara paralel.

Prinsip-prinsip pemberdayaan lainnya dijelaskan oleh Mardikanto (2017: 105). Prinsip-prinsip tersebut adalah: (1) mengerjakan, artinya kegiatan pemberdayaan harus sebanyak mungkin melibatkan masyarakat untuk mengerjakan atau menerapkan sesuatu; (2) Akibat, artinya kegiatan pemberdayaan harus memiliki dampak atau pengaruh yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat, kondisi ini sangat mempengaruhi semangat masyarakat dalam mengikuti pemberdayaan di kedepannya; (3) Asosiasi, artinya setiap kegiatan pemberdayaan harus dikaitkan dengan kegiatan lainnya, sebab seseorang cenderung untuk mengaitkan kegiatannya dengan peristiwa atau kegiatan yang lainnya.

### **2.1.5 Sasaran Pemberdayaan**

Pemberdayaan merupakan suatu bagian dari masyarakat miskin tanpa harus meninggalkan ketimpangan structural yang terdahulu. Selain itu NGO juga merupakan agen penting yang mendapatkan posisi penting dikarenakan dipandang lebih bersifat *entrepreneur*, berpengalaman jika dibandingkan pemerintah. Seiring perkembangan konsep *good governance*, terdapat tiga pilar yang harus dipertemukan dalam proses pemberdayaan yaitu pemerintah, swasta, dan



masyarakat yang memiliki hubungan selaras (Mulyono, 2017: 46). Dengan kata lain bahwa sasaran dari pemberdayaan adalah masyarakat rentan atau masyarakat miskin yang memiliki potensi-potensi baik berupa sumber daya manusia maupun sumber daya alam untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas.

### **2.1.6 Karakteristik Pemberdayaan**

Pemberdayaan merupakan suatu proses yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk memperoleh pemahaman dan pengendalian tentang kekuatan sosial, ekonomi, ataupun politik untuk memperbaiki tatanan kehidupannya di masyarakat. melalui proses pemberdayaan tersebut seseorang atau kelompok akan akan memperoleh sarana-sarana tersebut.

Karakteristik dasar pada pemberdayaan dapat diidentifikasi sebagai berikut: (1) Struktur kelompok kecil, yaitu pemberdayaan menekankan pada kegiatan kelompok kecil. (2) Alih tanggung jawab, yaitu dalam pelaksanaan implementasi pemberdayaan, lambat laun partisipan yang semakin meningkatkan keaktifan, inisiatif dan tanggung jawabnya, maka agen pembangunan akan menurunkan inisiatif dan tanggung jawabnya. Alih tanggung jawab tersebut mengajarkan partisipan untuk menyelesaikan permasalahan dirinya secara mandiri. (3) Kepemimpinan partisipatif, yaitu partisipan dilatih untuk mengendalikan dan membuat keputusan terhadap semua aspek organisasi atau kegiatan yang diambil. (4) Agen sebagai fasilitator. (5) Fasilitator dalam pemberdayaan bertugas untuk menekankan peranannya sebagai pendukung kelompok terhadap keputusan yang telah diambilnya. (6) Proses dan hubungan yang bersifat demokratis, semua

anggota kelompok dipandang dan diperlakukan secara sama dengan keputusan yang dibuat dan ditentukan bersama pula. (7) Keterpaduan refleksi dan tindakan, pengalaman pribadi yang dimiliki anggota kelompok jika dikolaborasikan dengan program yang terdapat di pemberdayaan maka akan menghasilkan sebuah perubahan. (8) Metode yang mendorong kesadaran diri, yaitu metode yang digunakan dapat dengan meningkatkan keterlibatan aktif, dialog, dan kegiatan-kegiatan kelompok seperti belajar dengan sebaya, jaringan kerja yang mendukung, lokakarya dan sejenisnya, dan (9) Perbaikan sosial, ekonomi, dan/ atau politik, yaitu hasil dari proses pemberdayaan adalah partisipasi yang dapat meningkatkan kemampuannya ketika berada ditengah-tengah masyarakat (Rifa'I, 2008: 43).

### **2.1.7 Indikator Pemberdayaan**

Menurut Kieffer (dalam Suharto, 2014: 63) pemberdayaan mencakup tiga dimensi yang meliputi kompetensi kerakyatan, kemampuan sosiopolitik, dan kompetensi partisipatif. Terdapat delapan indikator pemberdayaan yang dikembangkan oleh Schuler, Hashemi, dan Riley yang disebut dengan *empowerment index*. Delapan indikator tersebut adalah sebagai berikut: (a) Kebebasan mobilitas, yaitu kemampuan individu untuk pergi ke luar rumah atau wilayah tempat tinggalnya. (b) Kemampuan membeli komoditas kecil, yaitu kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari, terutama untuk kebutuhan dirinya sendiri. (c) Kemampuan membeli komoditas besar, yaitu kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan sekunder atau tersier. (d) Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga, yaitu mampu membuat keputusan baik secara mandiri

atau bersama. (e) Kebebasan relatif dari dominasi keluarga, yaitu responden ditanya mengenai apakah dalam kurun satu tahun terakhir terdapat seseorang yang mengambil atau menggunakan barang miliknya tanpa ijin darinya, atau yang melarang dirinya untuk mempunyai anak atau bekerja. (f) Kesadaran hukum dan politik, yaitu dengan mengetahui nama salah seorang pejabat desa atau daerah atau presiden, serta mengetahui hukum atau norma-norma yang berlaku. (g) Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes, yaitu seseorang dapat dikatakan berdaya apabila ia pernah terlibat dalam kampanye atau bersama orang lain yang melakukan protes. (h) Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga, yaitu dapat ditunjukkan dengan memiliki rumah, tanah, aset produktif, dan tabungan secara terpisah dari pasangannya.

Menurut Suharto (dalam Herwina, 2019: 83) indikator yang terdapat pada program pemberdayaan memiliki tiga aspek yaitu ...*(1) economic capacity, (2) ability to access welfare benefits, and (3) cultural and political abilities*". Aspek-aspek tersebut adalah kapasitas ekonomi, kemampuan untuk mengakses kesejahteraan, dan kemampuan untuk berbudaya dan berpolitik. Ketiga aspek tersebut harus terjalin secara sinkron dan baik agar pemberdayaan tersebut menghasilkan peningkatan-peningkatan sesuai dengan yang diharapkan.

### **2.1.8 Pendekatan Pemberdayaan**

Pendekatan-pendekatan yang dilakukan dalam proses pemberdayaan menurut Mulyono (2017: 47) adalah sebagai berikut: (1) Pendekatan *zero-sum*, pendekatan ini memahami pemberdayaan sebagai sudut pandang konfliktual

dimana pendekatan ini lebih sesuai untuk menganalisis pemberdayaan dalam pengertian pengalihan kekuasaan. (2) Pendekatan *positive-sum*, pendekatan ini menekankan manakala pemberdayaan dari pihak berkuasa/berdaya kepada pihak yang lemah, justru akan memperkuat daya pihak pertama. Dengan demikian pemberi daya akan memperoleh manfaat yang positif berupa peningkatan daya apabila melakukan pemberdayaan terhadap pihak yang lemah.

Sedangkan menurut Suharto (2014: 67) suatu proses pencapaian tujuan dari pemberdayaan dapat dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yang dapat disingkat dengan 5P, yaitu: pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan. (1) Pemungkinan, yaitu dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang secara optimal. (2) Penguatan, yaitu memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. (3) Perlindungan, yaitu melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari persaingan yang tidak seimbang antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. (4) Penyokongan, yaitu dengan pemberian bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya, dan (5) Pemeliharaan, yaitu dengan memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat.

### **2.1.9 Proses Pemberdayaan**

Proses pemberdayaan merupakan proses pemberian pembelajaran dan pelatihan yang diberikan kepada masyarakat rentan atau masyarakat miskin secara terstruktur dengan tujuan agar mereka mampu mandiri dan dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Tohari (2019: 36) bahwa *Empowerment intervention could be created by doing a vocational life skill that is intended to improve the community skills to produce economic product or service*. Beliau menjelaskan bahwa kegiatan pemberdayaan dapat dilakukan dan dapat berjalan dengan baik apabila dilakukan dengan berfokus pada potensi awal yang dimiliki masyarakat atau sasaran tersebut dengan tujuan untuk meningkatkan keterampilan serta mampu menghasilkan produk atau layanan ekonomi.

Sedangkan suatu pemberdayaan dalam masyarakat yang digambarkan oleh *United Nations* (dalam Zubaedi, 2012: 77) melalui proses sebagai berikut: (1) *Getting to know the local community*. Mengetahui karakteristik masyarakat yang akan diberdayakan termasuk dengan mengetahui perbedaan karakteristik masyarakat satu dengan yang lain. (2) *Gathering knowledge about the local community*. Mengumpulkan pengetahuan yang menyangkut informasi masyarakat setempat seperti umur, pekerjaan, kondisi sosial ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. (3) *Identifying the local leaders*. Mendapat dukungan dari tokoh-tokoh pimpinan setempat dalam melaksanakan proses pemberdayaan. (4) *Stimulating the community to realize that it has problems*. Melakukan pendekatan persuasif terhadap masyarakat yang terikat pada adat istiadat yang secara tidak sadar mereka memiliki masalah yang harus dipecahkan. (5) *Helping people to discuss their problems*. Memberdayakan masyarakat yaitu dengan merangsang

masyarakat dalam mendiskusikan dan merumuskan pemecahan atas permasalahannya dalam suasana musyawarah. (6) *Helping people to identify their most pressing problems*. Memberdayakan masyarakat agar mampu mengidentifikasi permasalahan mereka yang paling utama untuk diselesaikan. (7) *Fostering self-confidence*. Membangun rasa kepercayaan diri pada masyarakat. (8) *Deciding on a program action*. Memberdayakan masyarakat untuk menentukan dan melakukan suatu program berdasarkan dengan skala prioritas. (9) *Recognition of strengths and resources*. Dengan memberdayakan berarti menyadarkan masyarakat akan kekuatan-kekuatan dan sumber-sumber yang dapat dimobilisasikan untuk memecahkan permasalahan dan memenuhi kebutuhan. (10) *Helping people to continue work on solving their problems*. Pemberdayaan merupakan kegiatan yang berkesinambungan. (11) *Increasing people's ability for self-help*. Pemberdayaan menghasilkan masyarakat yang mandiri.

Mardikanto (2017: 126) dalam tulisannya memberikan penjelasannya sendiri mengenai proses pemberdayaan. Menurutnya pemberdayaan merupakan usaha untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf kehidupannya, maka masyarakat harus bersama-sama dalam melakukan kegiatan sebagai berikut: (1) Mengidentifikasi dan mengkaji potensi wilayah, permasalahan, serta peluang-peluangnya. Proses ini bertujuan untuk menimbulkan rasa mampu dan percaya diri pada masyarakat dalam mengidentifikasi serta menganalisis keadaannya, baik dari segi potensi maupun permasalahannya. (2) Menyusun rencana kegiatan kelompok yang meliputi menentukan prioritas dan menganalisa masalah, mengidentifikasi alternatif

pemecahan masalah, mengidentifikasi alternatif sumber daya pemecahan masalah, serta pengembangan dan pengorganisasian rencana pelaksanaan kegiatan. (3) Menerapkan rencana kegiatan kelompok, yaitu rencana kegiatan disusun bersama dengan mendapat dukungan fasilitas dari pendamping yang kemudian diimplementasikan sesuai dengan rencana awal. Selain itu pemantauan pelaksanaan dan kemajuan kegiatan juga selalu diperhatikan. (4) Memantau proses dan hasil kegiatan secara terus menerus dengan cara partisipatif (*participatory monitoring and evaluation/PME*). PME ini dilakukan secara mendalam pada semua tahapan untuk mengetahui proses penilaian, pengkajian dan pemantauan kegiatan, baik dari segi proses maupun hasil dan dampaknya untuk perbaikan kedepannya.

## **2.2 Kelompok Wanita Tani**

### **2.2.1 Definisi Kelompok**

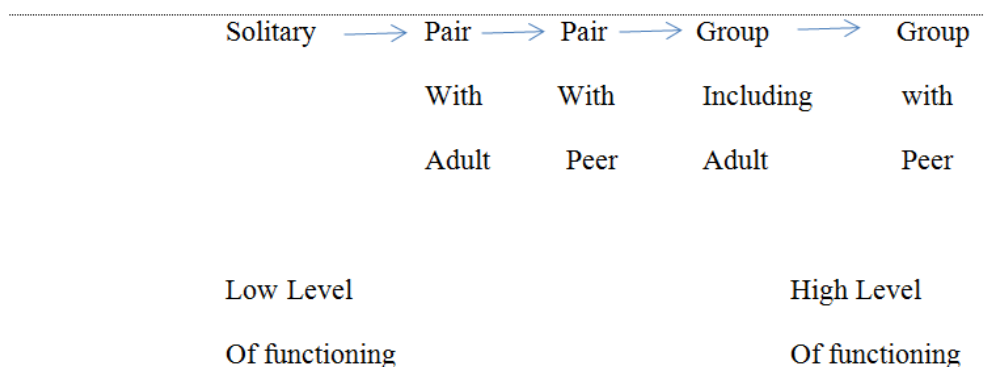
Kelompok merupakan suatu kondisi dimana terdiri dari dua orang atau lebih yang memiliki tujuan yang sama untuk menjalankan dan mencapai suatu kegiatan atau program yang sudah direncanakan. Sedangkan menurut Johnson (dalam Zulkarain, 2013: 1) kelompok dapat dijabarkan menjadi tujuh definisi yaitu: (1) Tujuan, yaitu kelompok dapat diartikan sebagai sejumlah atau beberapa orang yang berkumpul bersama untuk mencapai tujuan bersama. (2) Ketergantungan yaitu kelompok diartikan sebagai sekumpulan orang yang bergabung dalam beberapa hal atau peristiwa yang saling mempengaruhi satu sama lain. (3) Interaksi antar individu, yaitu kelompok diartikan sebagai sejumlah individu yang saling berinteraksi satu sama lain. (4) Persepsi keanggotaan, yaitu kelompok diartikan sebagai suatu kesatuan sosial yang terdiri dari dua orang atau lebih dimana orang-

orang didalamnya menganggap diri mereka berada dalam suatu kelompok. (5) Hubungan terstruktur, yaitu kelompok dapat diartikan sebagai sekumpulan individu yang interaksinya tersusun dalam serangkaian peran dan norma yang sedang atau sudah berlaku di dalamnya. (6) Motivasi, yaitu kelompok diartikan sebagai sekumpulan individu yang mencoba untuk memuaskan beberapa kebutuhan pribadinya melalui sebuah kebersamaan. (7) Pengaruh yang menguntungkan, yaitu kelompok dapat diartikan sebagai sekelompok orang yang saling mempengaruhi satu sama lain.

Zanden (dalam Zulkarnain, 2013: 2) menambahkan mengenai pengertian dari kata kelompok. Menurutnya kelompok merupakan sekumpulan individu yang memiliki perasaan senasib sehingga perasaan yang satu dapat dirasakan oleh anggota kelompok yang lain. dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kelompok merupakan kumpulan beberapa orang yang terdiri dari dua orang atau lebih yang saling berinteraksi satu sama lain, memiliki peran dan tugas masing-masing yang terstruktur secara terencana untuk mencapai tujuan bersama.

Sebuah kelompok harus terdapat adanya interaksi antar anggota kelompoknya. Jika tidak ditemukannya interaksi dalam sebuah kelompok tersebut atau interaksi kelompok tidak terjalin dengan baik maka akan mengakibatkan adanya rasa keterpencilan atau keterasingan yang dialami oleh anggota kelompok yang bersangkutan. Jika kondisi tersebut berlangsung terlalu lama, maka akan mengganggu atau menghambat proses pencapaian tujuan dari kelompok tersebut karena kurangnya atau tidak adanya interaksi yang berlangsung. Dalam hal ini interaksi sosial dan fungsinya dapat di gambarkan di bawah ini.





Dari pandangan tersebut tampak jelas akan pentingnya interaksi dalam kelompok untuk keberhasilan tujuan yang telah disusun dan direncanakan sebelumnya (Notosoedirdjo, 2001: 118). Dengan demikian kelompok merupakan sekumpulan individu yang berkumpul yang bergabung berdasarkan tujuan yang sama.

### 2.2.2 Ciri-Ciri Kelompok

Beberapa ahli telah mengemukakan mengenai beberapa ciri-ciri suatu kelompok, seperti halnya yang jelaskan oleh Shaw (dalam Zulkarnain, 2013: 8) beliau mnyebutkan bahwa sekumpulan orang dapat dikatakan sebagai kelompok apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (a) Setiap anggota memiliki persepsi yang didasarkan pada asumsi bahwa setiap orang sadar akan berhubungan dengan orang lain. (b) Memiliki tujuan bersama yang hendak dicapai. (c) Adanya motivasi dari setiap anggota kelompok untuk mendapatkan kepuasan yang diinginkannya

dari kelompok yang dimasukinya. (d) Adanya interdependensi, yaitu rasa saling ketergantungan antar anggota. (e) Terdapat interaksi dari bentuk rasa interdependensi tersebut. Maksudnya adalah tiap anggota saling berkomunikasi baik secara verbal, interaksi fisik, maupun interaksi emosional. (f) Adanya organisasi, yaitu adanya kesatuan fungsi dalam mekanisme regular yang berlaku didalamnya.

Dari beberapa ciri-ciri yang telah disebutkan di atas, dapat ditarik benang merah bahwasannya dalam suatu perkumpulan dapat dikatakan sebagai kelompok apabila terdapat kesamaan tujuan dan keterikatan anggota satu dengan yang lain sehingga menghasilkan suatu kerjasama dan interaksi yang baik.

### **2.2.3 Fungsi Kelompok**

Secara garis besar fungsi adanya suatu kelompok adalah untuk memenuhi kebutuhan anggota yang berada dalam kelompok tersebut agar memiliki kepuasan. Menurut Crech dan Crutchfield (dalam Zulkarnain, 2013: 8) menyebutkan beberapa fungsi kelompok secara rinci, yaitu: (1) Kelompok memiliki fungsi yaitu unik, maksudnya fungsi dari suatu kelompok dapat tergambar dapat tergambar pada kelompok tertentu secara sekaligus. (2) Kelompok memiliki fungsi *accessory*, maksudnya kelompok merupakan suatu bingkai atau gambaran dari kegiatan-kegiatan yang terdapat didalamnya yang terikat dalam satu kesatuan. (3) Kelompok memiliki fungsi *dominance* dan *belonginess*. Maksudnya meskipun dalam kelompok terdapat kegiatan sub kelompok, namun kelompok tetap dapat memelihara dan menjaga rasa kebersamaan dari segenap anggota kelompoknya.

Sedangkan Kartonno (dalam Zulkarnain, 2013: 8) memiliki pandangan lain mengenai ciri-ciri kelompok secara lebih dalam. Menurutnya suatu perkumpulan dapat dikatakan kelompok apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (1) Kelompok dikatakan sebagai wadah dan ruang psikologis bagi semua anggota kelompok di dalamnya sehingga menimbulkan rasa saling memiliki. (2) Munculnya kader atau figur yang menunjukkan loyalitas dan kesetiakawanan sosial. (3) Adanya penghargaan melalui kepemilikan peran dan status masing-masing untuk anggotanya. (4) Terdapat tujuan yang ideal dalam kelompok tersebut. (5) Suatu kelompok dapat menjadi wahana atau langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan. (6) Anggota kelompok didalamnya sebagai individu yang merasa sebagai organ dari kelompok yang dimasukinya..

#### **2.2.4 Struktur Kelompok**

Struktur kelompok merupakan suatu pola interaksi setiap anggota kelompok untuk menciptakan peran dan penggabungan norma-norma yang berlaku dalam kelompok tersebut. Peran dan norma merupakan struktur kelompok yang menjadi salah satu acuan setiap anggotanya dalam melakukan interaksi (Zulkarnain, 2013: 9).

##### **a) Peran**

Penentuan peran dalam suatu kelompok karena dapat menjadi struktur sosial dalam kelompok tersebut dan berfungsi untuk membedakan satu posisi dengan posisi yang lain. peran dalam kelompok yang dimaksud seperti ketua, sekretaris, bendahara, dan beberapa posisi yang lain yang biasanya ditentukan berdasarkan

ketertarikan dan keterampilannya agar anggota kelompok tersebut dapat bekerja dan memainkan perannya secara maksimal.

b) Norma

Berlainan dengan peran, adanya norma dalam suatu kelompok berfungsi untuk menggabungkan tindakan semua anggota yang terdapat dalam kelompok. Norma disini merupakan suatu kepercayaan umum yang dimiliki dan dipegang oleh suatu kelompok yang berkenaan dengan tindakan yang layak, sikap, dan pandangan untuk anggota kedepannya. Biasanya setiap kelompok memiliki kebijakan masing-masing dalam pembuatan dan pelaksanaan norma untuk anggotanya, dimana antara kelompok satu dengan kelompok yang lain terdapat kemungkinan terjadinya perbedaan norma yang berlaku.

### **2.2.5 Pengertian Kelompok Wanita Tani**

Kelompok wanita tani (KWT) merupakan sekumpulan atau sekelompok wanita yang memiliki aktivitas dibidang pertanian yang tumbuh atas dasar keserasian, keakraban, serta kesamaan dalam memanfaatkan sumber daya hasil pertanian dalam rangka meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggota yang tergabung didalamnya. Sedangkan menurut Taufiq (2018: 215) Kelompok wanita tani (KWT) merupakan organisasi atau kelompok masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan skill warga belajar untuk mendapatkan pelatihan atau pembinaan dari dinas pertanian dan dinas ketahanan pangan yang harapannya akan mampu menggerakkan kegiatan-kegiatan yang dapat menunjang perekonomian. Oleh karena itu upaya pemberdayaan kelompok tani diarahkan pada tumbuhnya suatu kerjasama yang didasarkan dari kesadaran petani yang tergabung

didalamnya untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Jurnal internasional dijelaskan mengenai wanita tani:

*According to Ervinawati et al (2015in Camalianand Iwan, 2017: 349) asserted that woman farming is not only contributing to farming, but has become the backbone of the family in fulfilling the economic needs of the family.*

Dapat diartikan sebagai berikut: menurut Ervinawati et al (dalam Camalian dan Setiawan, 2017: 349) menegaskan bahwa wanita tani tidak hanya berkontribusi pada pertanian, tetapi telah menjadi tulang punggung keluarga dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Jadi, fungsi kelompok wanita tani tidak hanya sebagai perkumpulan isteri petani atau perempuan desa yang memiliki kegiatan dibidang pertanian saja, tetapi lebih dari itu bahwa kegiatan yang ada dalam kelompok wanita tani ini dapat memberikan dampak positif yang dapat meningkatkan taraf ekonomi pada keluarganya.

Fungsi dari adanya KWT adalah sebagai wadah belajar, unit produksi, wahana kerjasama serta sebagai wadah pembinaan bagi para petani dalam mengolah dan mengelola hasil sumber daya pertanian sesuai dengan kebutuhan pasar selain mereka berperan sebagai istri dan ibu rumah tangga dengan segala kesibukannya. Seperti yang dijelaskan oleh Nurmayasari dan Ilyas (2014: 19) bahwa anggota KWT tidak hanya aktif dalam kegiatan KWT saja, mereka tetap melaksanakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga dalam mengelola dan mengatur rumah tangga serta memperhatikan anak-anaknya. Dalam pemberdayaan seiring berjalannya waktu mereka akan dapat mengatur waktu dan menyeimbangkan antara kegiatan KWT dengan urusan rumah.

Soedijanto (dalam Sadono, 2008: 69) menyatakan bahwa mutu SDM petani akan dapat mendukung pembangunan pertanian pada masa kini dan masa mendatang apabila dengan adanya penyuluhan pertanian yang merupakan suatu pemberdayaan. Dimana harapan dari adanya pemberdayaan petani-petani tersebut dapat mengubah petani melalui 6 dimensi belajar (learning) yaitu: (1) *Learning to know*, yaitu penguasaan konsep, komunikasi informasi, pemahaman lingkungan, rasa senang memahami, mengerti dan menemukan sesuatu. (2) *Learning to do*, yaitu penekanan pada skill tingkah rendah ke tingkat tinggi menuju arah kompetensi. (3) *Learning to live together*, yaitu mengenal diri sendiri, mengenal diri orang lain, menemukan tujuan bersama, serta mampu bekerjasama dengan orang lain. (4) *Learning to be*, yaitu dapat memecahkan masalah sendiri, dapat mengambil keputusan dan memikul tanggung jawab, belajar untuk disiplin. (5) *Learning society*, yaitu dapat mengembangkan diri secara utuh dan terus menerus. (6) *Learning organization*, yaitu dapat belajar untuk memimpin, belajar untuk berorganisasi, serta belajar mengajarkan kepada orang lain.

Adanya pemberdayaan kelompok wanita tani akan membentuk kemandirian petani. Menurut Sumardjo (dalam Sadono, 2008: 70) menjelaskan kemandirian petani (*farmer autonomy*) merupakan pembentukan petani secara utuh yang mampu memilih dan mengarahkan kegiatan usaha taninya sesuai dengan kehendaknya sendiri yang diyakininya memiliki tingkat manfaat paling tinggi namun bukan berarti sikap menutup diri melainkan dengan sikap rendah hati menerima situasi masyarakat dan aturan-aturan yang terdapat di dalamnya, serta motif-motif perilaku yang berasal dari seluruh kenyataan yang dihadapi dalam kehidupannya. Selain itu

pemberdayaan perempuan melalui kelompok tani bertujuan untuk membantu mewujudkan ketahanan pangan dan mengurangi kelaparan serta meningkatkan efisiensi intervensi kebijakan. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Vouvo (2017: 40) bahwa:

*...female empowerment to improving household productivity. Likewise, female empowerment in the agricultural sector is seen as essential for achieving food security and reduce hunger, as well as enhancing the efficiency of policy interventions.*

Program pertumbuhan dan pengembangan kelompok wanita tani dilaksanakan oleh dan untuk kepentingan kelompok tani itu sendiri. Target yang ingin dicapai dari pengembangan dengan adanya kelompok wanita tani adalah mewujudkan suatu kelompok yang dinamis, sehingga anggota kelompok memiliki sikap disiplin, tanggung jawab, terbuka terhadap perubahan dan pengembangan, kreatif dan terampil dalam bekerjasama mengelola kegiatan usaha tani. Program pengembangan kelompok wanita tani dapat dilakukan melalui beberapa kegiatan seperti study banding ke KWT lain, pelatihan pengolahan, pemberian motivasi kelompok serta musyawarah anggota secara rutin.

Adanya kelompok wanita tani di pedesaan dapat menjadi wadah untuk menjalin kerjasama yang baik antara pihak pemerintah atau swasta dengan masyarakat dalam membantu masyarakat untuk memecahkan permasalahan antara lain berupa pemenuhan sarana produksi pertanian, teknis produksi, dan pemasaran hasil pertanian.

### **2.3 Kerangka Berpikir**

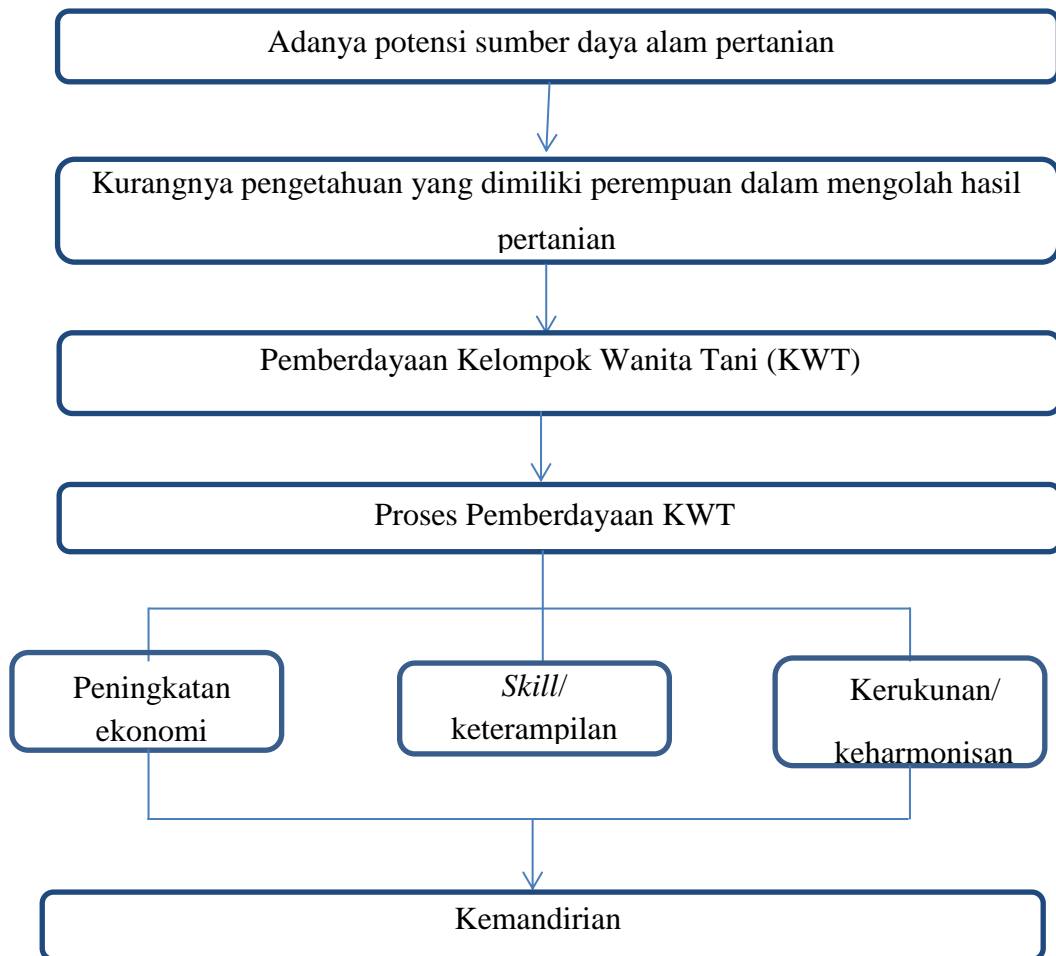
Salah satu pihak yang terlibat dalam program pembangunan nasional adalah kaum perempuan. Dimana perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam turut serta dalam meningkatkan kualitas hidup baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing. Namun realita yang ada, kondisi perempuan khususnya pada daerah pedesaan kurang mendapat perhatian terutama dalam pemerolehan pembelajaran dan pendidikan. Pada daerah pedesaan masih menganggap perempuan pada posisi lemah sehingga mereka kurang mendapatkan ruang untuk mengembangkan potensi yang terdapat pada diri mereka.

Tersedianya sumber daya alam yang memadai yaitu dalam sektor pertanian yang terdapat di Dukuh Dawung yang merupakan satu satunya dukuh swasembada di kelurahan Kedungpane, dan sampai saat ini sumber daya alam tersebut kurang tergarap dengan baik dan maksimal. Kondisi tersebut dikarenakan pemanfaatan sumber daya alam tersebut tidak didukung dengan baik oleh sumber daya manusianya. Pemberdayaan yang berfokus pada pertanian sangat diperlukan sebagai wadah yang diharapkan mampu membantu menyelesaikan permasalahan mereka, salah satunya yaitu dengan dibentuknya Kelompok Wanita Tani (KWT). Sebagaimana yang terdapat di Dukuh Dawung yaitu dengan adanya KWT Asri yang merupakan salah satu wadah perempuan tani Dukuh Dawung dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, perekonomian, dan keharmonisan sehingga dapat berujung pada kemandirian anggota KWT.

Kegiatan pemberdayaan yang diberikan adalah dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan pemaksimalan sumber daya



pertanian agar sumber daya tersebut dapat tergarapkan secara maksimal. Sumber daya alam yang dapat tergarap dengan maksimal dengan diiringi pengetahuan serta keterampilan yang dimiliki oleh anggota KWT maka diharapkan akan meningkatkan kemandirian anggota KWT Asri. Berikut bagan kerangka berpikir:



## **BAB 5**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah peneliti lakukan, yaitu tentang pemberdayaan Kelompok Wanita Tani (KWT) Asri di Dukuh Dawung dapat disimpulkan bahwa:

##### **1.1.1 Proses pemberdayaan KWT Asri di Dukuh Dawung Kelurahan Kedungpane**

Kecamatan Mijen Kota Semarang sudah berjalan dengan baik dan tertstruktur sesuai dengan teori proses pemberdayaan yang terdiri proses pengidentifikasian program meliputi potensi, permasalahan kelompok dan wilayah serta peluang kelompok. Kemudian dilanjutkan tahap perencanaan program meliputi tahap penyadaran anggota, perekrutan anggota dan pengelola, serta persiapan lapangan. Proses yang yang ketiga yaitu proses pelaksanaan yang sudah berjalan sesuai dengan yang direncanakan mulai dari waktu, tempat, jenis kegiatan, materi, dan partisipasi anggota. Terakhir yaitu pemantauan dan evaluasi program yang dilaksanakan pada setiap proses dan kegiatan baik oleh pengelola maupun oleh pendamping.

##### **1.1.2 Dampak yang terjadi dari adanya program pemberdayaan perempuan KWT**

Asri adalah dengan adanya peningkatan keterampilan, wawasan, serta ekonomi bagi anggota KWT Asri.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai pemberdayaan kelompok wanita tani (KWT) asri di Dukuh Dawung Kelurahan Kedungpane Kecamatan Mijen Kota Semarang, maka peneliti dapat memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat membantu meningkatkan dan mengembangkan KWT Asri menjadi lebih baik lagi dan mampu mengangkat Dukuh Dawung melalui potensi pertaniannya, sebagai berikut:

### 5.2.1 Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah yaitu Dinas Pertanian Kota Semarang untuk lebih mengoptimalkan terhadap pemberian pelatihan-pelatihan serta pemantauan secara rutin dan terstruktur agar pelaksanaan pemberdayaan dapat berjalan dengan lancar serta baik.

### 5.2.2 Bagi KWT Asri

5.2.2.1 Untuk kedepannya KWT Asri agar lebih menyiapkan dengan baik dan terstruktur agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan lancar.

5.2.2.2 Untuk kedepannya KWT Asri agar lebih terstruktur dalam membagi, mengelola dan menjalankan tugas-tugasnya.

### 5.2.3 Bagi Anggota KWT Asri

5.2.3.1 Untuk kedepannya agar lebih meningkatkan rasa percaya dirinya dalam mengolah dan mengenalkan hasil pertanian dan menjual produknya ke pasar dengan jumlah yang lebih banyak.

5.2.3.2 Untuk kedepannya mampu meningkatkan dan mempertahankan semangat dan dan kerjasamanya dalam kelompok dengan baik.

#### 5.2.4 Bagi Masyarakat

Masyarakat dapat terus memberikan dan meningkatkan dukungannya terhadap KWT Asri dalam melaksanakan program kerjanya, agar masyarakat juga turut merasakan keberadaan dari KWT Asri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afifudin & Beni Ahmad Saebani. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Al Gharaibeh, Fakir. (2011). Women's Empowerment in Bahrain. *Journal of International Women's Studies*, 12(3), 96-113.
- Anwas, Oos M. (2014). *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung: Alfabeta.
- Ariefianto, Lutfi & Muhammad Irfan Hilmi. (2019). The Contribution Education in Tourism Development Through Empowerment and Training of Street Vendors. *Journal of Nonformal Education*, 5(1).
- Arikunto, Suharsimi. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Auliya, Falakhul & Tri Suminar. (2016). Strategi Pembelajaran yang dapat Mengembangkan Kemandirian Belajar di Komunitas Belajar Qaryah Thayyibah. *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, 5(1), 10-15.
- Badan Pusat Statistik Jakarta Pusat. (2018). *Pedoman Pendataan Survey Angkatan Kerja Nasional Tahun 2018*. Jakarta Pusat: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Jakarta Pusat. (2018). *Pedoman Pendataan Jumlah Lahan Baku Pertanian Indonesia Tahun 2018*. Jakarta Pusat: Badan Pusat Statistik.
- Bhastoni, Khamilia & Yayuk Yuliati. (2015). Peran Wanita Tani di atas Usia Produktif dalam Usaha Tani Sayuran Organik terhadap Pendapatan Rumah Tangga di Desa Sumberejo Kecamatan Batu. *Habitat*, 26(2), 119-129.

- Bungin, Burhan. (2003). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Camalian, M., & Setiawan, I. (2017). The Role of Women Farmer Group In Increasing Family Welfare. *Jounal Mimbar*, 33(1), 348-358.
- Deraputri, Gevia Nur Isna, R., Nunung Nurwati & Risna Resnawaty. (2017). Pemberdayaan Perempuan melalui Program Pendidikan Kewirausahaan Kreatif Terpadu untuk Perempuan, Anak, dan Keluarga oleh Organisasi World Muslimah Fondation di Kmapung Muka, Jakarta Utara. *Prosiding KS: Riset & PKM*, 3(5).
- Desmawati, Liliek., Achmad Rifai RC & Sungkowo Edy Mulyono. (2015). Penanggulangan Masyarakat Miskin Kota Rawan Kriminalitas melalui Pemberdayaan Masyarakat di Jalur Pendidikan Nonformal di Kota Semarang. *Journal of Nonformal Education*, 1(1).
- Dewi, Kartika Rahmat Sari., Andayani & Nugraheni Eko Wardhani. (2017). Citra Emansipasi Perempuan dalam Mahabarata: Pelurusan Makna Peran dan Kebebasan bagi Perempuan Modern. *Jurnal Masyarakat & Budaya*, 19(2).
- Dewi, Mutia, Amin Nurohmah & Ninik Sri Rahayu. (2018). Pemberdayaan Pemberdayaan melalui Usaha Batik Tulik: Sebuah Pengalaman dari Pelaksanaan Program IPTEK bagi Masyarakat (IBM) di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. *Jurnal Abdimas Musi Charitas*, 2(2).
- D, Albertus Daru & Desriana Yusi Irawati. (2017). Analisis Dampak Partisipasi Perempuan dalam Usaha Sektor Informal terhadap Pemberdayaan Perempuan Berdasarkan Koefisien Kontingensi Cramer. *Jurnal Teknik Industri HEURISTIC*, 14(2), 123-138.
- Hanafie, Rita. (2010). *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.

- Herwina, Wiwin & Mustakim. (2019). Business and Industry World Contributions to Community Empowerment. *Journal of Nonformal Education*, 5(1).
- Hidayat, Dayat & Ahmad Syahid. (2019). Local Potential Development (Local Genius) in Community Empowerment. *Journal of Nonformal Education*, 5(1).
- Khotimah, Ema. (2018). Analisis Kritis Teori Pembangunan dan Kedudukan Perempuan dalam Perspektif Ekofeminisme. *Jurnal Gender dan Anak*. 1(1).
- Kusumaningrum, Demeiati Nur. (2016). Pengaruh Perspektif Pemberdayaan Perempuan dalam Kebangkitan Ekonomi Lokal: Industri Tempe Sagu di Dusun Mrisi-Yogyakarta. *Jurnal INSIGNIA*, 3(2).
- Malik, Abdul & Sungkowo Edy Mulyono. (2017). Pengembangan Kewirausahaan Berbasis Potensi Lokal melalui Pemberdayaan Masyarakat. *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, 1(1), 87-101.
- Mardikanto, Totok., Poerwoko Soebianto. (2017). *Pemberdayaan Masyarakat: dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Moleong, Lexy J. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Muarifuddin, M. (2017). Implementasi Pembangunan Desa Wisata Batik Desa Babagan Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang. *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 4(1), 51-70.
- Muarifuddin., Sungkowo Edy Mulyono & Abdul Malik. (2016). Analisis Kebutuhan Pengembangan Desa Wisata Batik Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang. *Journal of Nonformal Education*, 2(1), 58-70.
- Muljono, Pudji, et al (2019). Economical Empowerment Index of Posdaya as Participatory of Community Empowerment Programe in Indonesia. *Italian Sociological Review*, 9(1), 65-96.

- Mulyono, Sungkowo Edy. (2015). Model Pemberdayaan Masyarakat untuk Peningkatan Literasi Berbasis Kewirausahaan Usaha Mandiri melalui PKBM di Kota Semarang. *Journal of Nonformal Education*, 1(1).
- Mulyono, Sungkowo Edy. (2017). *Kemiskinan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Notosoedirdjo, Moeljono & Latipun. (2001). Kesehatan Mental: *Konsep dan Penerapan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Nurhalim, Khomsun. (2012). Kinerja Pamong Belajar pada Sanggar Kegiatan Belajar. *Jurnal ilmu pendidikan*, 18(1), 17-22.
- Nurmayasari, D., & Ilyas. (2014). Peran Anggota Kelompok Wanita Tani (Kwt) Laras Asri Pada Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (Studi Deskriptif Di Dusun Daleman Desa Kadirejo Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang). *Journal of Nonformal Education And Community Empowerment*, 3(2), 16-21.
- Partini. (2004). Potret Keterlibatan Perempuan dalam Pelayanan Publik di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 7(3), 315-334.
- Raharjo, Tri Joko., Tri Suminar & Mu'arifuddin. (2016). Peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dalam Menanggulangi Kemiskinan melalui Pendidikan Nonformal di Jawa Tengah. *Journal Nonformal Education*. 2(1), 21-38.
- Raharjo, Tri Joko., Achmad Rifai RC. & Tri Suminar. (2015). Keefektifan Manajemen Pendidikan Karakter Pilar Konservasi Budaya melalui Strategi Pembelajaran Inkuiri Sosial bagi Mahasiswa Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. *Journal Nonformal Education*. 1(1), 25-34.
- Rahman, A. (2013). Women's Empowerment: Concept And Beyond. *Global Journal Of Human Social Science Sociology & Culture*, 13(6), 8-13.



- Rahmawati, Evi & Bagus Kisworo. (2017). Peran Pendamping dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Program Keluarga Harapan. *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, 1(2), 161-169.
- Republika.co.id*. (2018). Masalah Terbesar Ekonomi Indonesia Saat Ini Menurut Jokowi.  
<https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/18/08/27/pe45se377-masalah-terbesar-ekonomi-indonesia-saat-ini-menurut-jokowi>. (diakses pada tanggal 22/02/19).
- Rifa'I, Achmad. (2008). *Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendidikan Nonformal*. Semarang: UNNES Press.
- Sadono, Dwi. (2008). Pemberdayaan Petani: Paradigma Baru Penyuluhan Pertanian di Indonesia. *Jurnal Penyuluhan*, 4(1), 65-74..
- Saragih, Jef Rudiantho. 2015. *Perencanaan Wilayah dan Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Pertanian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Siswati, latifa dkk. (2017). Pemberdayaan Perempuan dalam Mengatur Kesehatan dan Peningkatan Perekonomian Keluarga. *Jurnal sinergitas PKM & CSR*, 2(1), 42-50.
- Siswanto, Yudi., Joko Sutarto & Sungkowo Edy Mulyono. (2018). E-training Based on Determination of Education and Training Models of Early Childhood Teachers Education Programs. *Journal of Nonformal Education*. 4(2), 107-118.
- Soetomo. (2015). *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sufyan, Muhammad Anis., Komsun Nurhalim & Imam Shofwan. (2019). Learning Management of Nonformal Education Units in Sanggar Kegiatan Belajar. *Journal of Nonformal Education*, 5(1), 57-66.

- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&Di*. Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugito, Toto., Rili Windiasih & Adhi Iman Sulaiman. (2018). Aktualisasi Pembangunan Partisipatif dalam Forum Komunikasi Pemberdayaan Perempuan Desa. *Acta diurnal*, 14(1).
- Suharto, Edi. (2014). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja. Rosadakarya.
- Sutarto, Joko., Sungkowo Edi Mulyono., Khomsun Nurhalim & Hesty Pratiwi. (2018). Model Pemberdayaan Masyarakat melalui Pelatihan Kecakapan Hidup Berbasis Keunggulan Lokal Desa Wisata Mandiri Wanurejo Borobudur Magelang. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 35(1), 27-40.
- Syahid, Maulana. (2014). Peran Politik Perempuan dalam Pemikiran Siti Musdah Mulia. *Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, 4(1), 31-66.
- Taufiq, Amal & Habib R. (2018). Revitalisasi Kelompok Wanita Tani (KWT) melalui Pemanfaatan Pekarangan Rumah di Desa Metesih Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(2).
- Theresia, Aprilia dkk. (2015). *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Tohari, Entoh., Iis Prasetyo & RB. Suharta. (2019). Women Empowerment In Disaster Vulnerable Village Through Vocational Life Skill Education

Based On Utilization Of Local Potential. *Journal of Nonformal Education*, 5(1), 35-46.

Vouvo, Belmondo Tanankem., Efobi Uchenna & Scholastica Ngozi Atata. (2017). Women Empowerment and Intra-Household Dietary Diversity in Nigeria. *Journal of Research in Gender Studies*, 7(2).

Wahyono, Sri. (2010). Tinjauan Manfaat Kompos dan Aplikasinya pada Berbagai Bidang Pertanian. *Jurnal pusat teknologi lingkungan badan pengkajian dan penerapan teknologi*. 6(1), 29-38.

Wibowo, Novan Budi. (2017). Pemberdayaan Perempuan Marjinal melalui Program Pendidikan Kecakapan Hidup dalam Mengembangkan Keterampilan Kewirausahaan Warga Belajar PKBM Taruna Murti Srandakan. *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah Edisi*, 6(1), 88-99.

Yani, ahmad. (2017). Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Sector Non Formal pada Pembinaan Narapidana Perempuan melalui Program Keterampilan Menjahit di Lembaga Pemasarakatan. *Jurnal transformasi*, 3(2), 1-13.

Zubaedi. (2012). *Pengembangan Masyarakat: Wacana & Praktik*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Zulkarnain, Wildan. (2013). *Dinamika Kelompok: Latihan Kepemimpinan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.